

masyarakat kita adalah perubahan-perubahan Politik. Dan itu kita harus bertekad kasih terhadap teman-teman mahasiswa.

---

## Civil Society Level Menengah Akan Muncul

---



KHOFIFAH INDAR  
PARAWANSA,

Pengurus DPP, Partai  
Kebangkitan Bangsa dan  
Menteri Negara Urusan  
Peranan Wanita.

**B**anyak yang mempertanyakan kenapa NU kembali ke panggung politik. Jawabannya paling tidak bisa kita lacak dari kronologi pendirian PKB yang dibacakan oleh pak Arifin Junaidi waktu deklarasi. Ini menjadi salah satu bagian yang mesti diperhatikan. Di sana dipaparkan mulai dari terpinggirkannya NU sampai kemudian ia sama sekali tidak memperoleh kontribusi dan tidak punya akses dalam struktur kekuasaan formal, hingga hal terpenting bahwa ini merupakan bentuk kepedulian NU terhadap krisis bangsa yang terjadi di hampir semua sektor. Krisis bangsa ini tidak hanya krisis ekonomi, tetapi juga menyangkut krisis budaya, moral, dan banyak hal lain yang mengalami degradasi. Inilah yang menyebabkan NU mewujudkan kepeduliannya, yang salah satunya berupa pendirian parpol. Karena yang bisa mengakses langsung dalam struktur kekuasaan adalah partai. Salah satu fungsi partai kan memang memperebutkan kekuasaan. NU sebagai jamiyyah jelas tidak mungkin ikut sebagai

peserta Pemilu. Akhirnya ia tidak dapat ikut memperebutkan kekuasaan. Hal tersebut harus dipikirkan mengingat tatanan atau struktur yang mudah untuk mengintervensi pembuatan kebijakan-kebijakan publik adalah penguasa, pemerintah. Maka mereka yang berada dalam kekuasaanlah yang akan punya kewenangan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Jadi, struktur inilah yang harus diisi oleh orang-orang yang memiliki komitmen kuat untuk membenahi krisis. Kalau dia berada di luar sistem, ya sulit, karena tidak bisa berperan secara efektif. Misalnya ada orang-orang NU yang memiliki komitmen untuk menangani krisis ekonomi, krisis budaya, dan sebagainya bila mereka cuma berdiri di luar sistem, hanya bisa teriak-teriak saja. Sebaliknya jika mereka masuk ke dalam sistem, maka akan punya power yang sudah pasti *legitimate* melalui proses Pemilu.

Mangapa ini tidak dirintis secara serius dari dulu sebelum NU menyatakan diri kembali ke khittah pada tahun 1984, karena dulu sangat sulit. Saya mengenal beberapa politisi NU di PPP. Saya melihat sepertinya mereka tidak mempunyai *fighting spirit* yang tangguh. Dalam sebuah pergesekan di tengah arena yang tidak hanya diisi oleh orang NU, semacam di PPP, kader-kader NU tersebut sewaktu berhadapan dengan elit MI, Persis, Perti, cenderung mengalah. Nah, menurut saya, hal itu terjadi karena mereka tidak punya *fighting spirit* yang optimal. Sampai misalnya era pak Harto, orang NU tidak pernah diberi kesempatan menjadi pimpinan partai. Ini sesungguhnya penghinaan luar biasa. *Lha wong* kita mayoritas. Maksudnya sebagai *supplier* suara di PPP, NU memang mayoritas. Dalam

pemilu 1992, NU menyuplai sekitar 70 persen suara. Dalam pemilu 1997, suara dari NU mungkin sekitar 60-an persen. Saya bilang semacam ini karena di Jawa Timur saja, NU menyumbang suara sebesar 25,4 persen. Data ini padahal tahun 1992. Jadi *supplier* utamanya, memang NU.

Namun di tingkat pimpinan, representasi NU sangat rendah sekali. Belum lagi jika dikaitkan dengan posisi-posisi strategis lainnya, orang NU pasti *ngalahan*. Hal itu menyebabkan NU selalu tidak diuntungkan oleh sistem yang memang mengharuskan adanya *competitiveness*. Contoh lagi, ada perlawanan dari daerah sewaktu Naro mengobrak-abrik PPP tahun 1987. Sayangnya, itu terjadi di daerah. Sedangkan di tingkat nasional, tidak. Makanya kalau NU berharap untuk mulai serius berkompetisi lewat PPP pada waktu dulu, tidak bisa.

Selama ini ada yang menilai bahwa sikap politik PBNU terhadap partai-partai dianggap diskriminatif. Menurut saya mereka harus berbicara secara historis. PKB didirikan oleh personal-personal yang kebetulan adalah elit-elitnya PBNU. Mereka tahu itu. Kemudian PBNU mengeluarkan surat pembentukan wilayah-wilayah dan cabang-cabang. Sedangkan yang membentuk wilayah tersebut adalah pengurus NU sendiri dan neven-nevennya. Begitu pula yang membentuk cabang. Dari sejarahnya kita tahu bahwa PKB memang didirikan oleh NU. Jadi, kalau saya melahirkan anak, dan saya kemudian merawatnya, dan tidak merawat anak orang lain, apakah lantas saya dianggap diskriminatif? Justru itu menurut saya sebuah konsekuensi logis. Karena melahirkan, ya ikut membesarkan. Akan sangat berbeda misalnya, jika klaim tersebut

berasal dari PPP. Karena secara historis NU ikut mendirikan, meski kemudian pada tahun 1984 NU sudah melepaskan ikatan historis tersebut sehingga saat ini, antara NU dengan PPP tidak masalah lagi. Sekarang bagaimana dengan PKU, PNU, dan SUNI? Seperti kita ketahui, proses pendirian PKU tidak melibatkan personal-personal PBNU, melainkan didirikan oleh warga NU. PNU juga didirikan oleh warga NU. Ikatannya menjadi sangat longgar. Apakah misalnya, pembentukan wilayah-wilayah dan cabang-cabang PKU juga dilakukan dengan membentuk semacam tim 5 yang anggotanya merupakan personal-personal yang ada dalam struktur NU? Kan tidak.

Jadi, saya pikir, sikap NU sebagaimana yang saya utarakan tadi sangat logis. Karena itu, dalam mabda' siyasinya PKB disebutkan bahwa antara PKB dengan NU terdapat tiga macam hubungan; hubungan historis, hubungan kultural, dan hubungan partisipatoris. Ini kan luar biasa. Sampai ada hubungan partisipatoris. Makanya, suara NU bagi saya cukup beralasan kalau harus disalurkan lewat PKB, dan PKB juga punya kewajiban untuk membawa aspirasi NU.

Ini jangan dianggap bahwa PBNU disalahgunakan para personilnya untuk mendirikan partai. Mestinya, kenapa mereka yang di luar PKB tidak mau berbesar hati. Orang-orang yang ada di PNU dan PKU itu sesungguhnya pendiri PKB juga. Saya tidak akan menyebut nama. Tapi yang jelas, mereka itu pendiri PKB dan ikut dalam proses awal pembentukannya. Masa' begitu sudah lahir malah mendirikan yang lain. Apakah sikap ini logis? Kenapa mereka mendirikan yang lain

lagi? Karena ternyata katanya ini tidak akomodatif, tidak demokratis, dan semacamnya. Saya sangat memahami karena mereka tidak masuk struktur. Berdirilah kemudian PNU. Pendiri PNU ini yang orang-orang PKU. Malah waktu itu ada seorang pendiri PKU yang bilang; "Pokoknya PKB tidak demokratis. Yang paling demokratis PNU." Namun setelah kelompoknya tidak terakomodir sesuai dengan yang diinginkan, mereka semua eksodus dari PNU. Mereka kemudian mendirikan PKU. Ada lagi yang di PKU merasa tidak diakomodir, lantas lari ke PPP. Jadi sejarah ini mesti dilihat secara utuh. Saya pikir orang pasti bisa membedakan. Mereka mendirikan partai karena ketidakpuasan. Padahal kalau sekedar menuruti ketidakpuasan, bisa-bisa ada sepuluh partai yang mengatasnamakan NU.

Seharusnya, jika partai ini sudah lahir, ini menjadi sebuah lembaga, dan mereka tidak perlu loyal kepada pribadi, melainkan kepada lembaga. Kalau orang merasa menjadi bagian dari lembaga, mestinya malu untuk mengungkapkan aib ke tengah publik. Mereka harus menjaga nama korps meskipun tidak setuju dengan personal-personalnya. Tidak malah mengumumkan kepada khalayak luas bahwa NU itu jelek, tidak demokratis, tidak akomodatif, dan sebagainya, sehingga akhirnya sampai keluar omongan Gus Dur yang "monumental" (pernyataan telur dan tahi, red.) kemarin. Artinya, paling tidak, perlu ada loyalitas kepada korps yang harus dibangun oleh semuanya. Toh yang namanya kepengurusan partai juga ada batas masanya. Lembagalah yang harus kita jaga. Kalau lembaga ini membentuk sayap

politik baru, dan kemudian tidak memuaskan semua pihak, ya wajar. Tidak ada keputusan yang dapat memuaskan semua pihak. Mereka yang tidak puas seharusnya bersabar. Nanti ketika periode kepengurusannya habis, mari kita semua berkompetisi. Saya lebih sepakat yang seperti itu, bukan malah mendirikan sendiri-sendiri. Sikap ini memang membutuhkan kedewasaan politik.

Saya kira di kalangan beberapa pihak dalam NU yang mendirikan partai selain PKB tidak ada alasan ideologis yang lebih prinsipil. Cuma kemudian mereka membentuk partai dengan asas Islam. lalu menjadi beda. Karena PKB ini inklusif, mereka maunya eksklusif. Saya pikir itu yang membedakan.

Prospek pengembangan *civil society* atau gerakan kultural yang sebelumnya digalakkan menjadi lebih baik ketika NU memiliki saluran politik. Karena *civil society* tidak harus berarti hanya menggarap level *grass root* semua. Bisa membutuhkan waktu berapa puluh tahun. Justru *civil society* sangat mudah dimunculkan dari level menengah ke atas. Kelompok kontrol lebih mudah tumbuh di kalangan menengah. Yang telah ada memang harus tetap dioptimalkan. Jadi tidak mesti menjauhi kekuasaan. Katakanlah PKB menang atau menjadi bagian kekuasaan. Maka gerakan kultural tidak lantas menjadi mandul. Kalau untuk sekarang, yang di bawah tetap digarap, tapi LSM-LSM dan asosiasi-asosiasi juga bisa menjalankan fungsi kontrol secara independen. Dalam konteks PKB ini, nantinya bukan berarti kelompok-kelompok NU lainnya menjadi pasif dan tidak bersedia melakukan kontrol. Tidak

seperti itu. Justru semacam itu yang salah dari proses politik selama ini. Ketika Golkar menjadi penguasa, maka *underboun-underbounnya* bikin laporan-laporan "asal bapak senang". Pokoknya semua hanya *yes man*. Nah, ini kan tidak mendidik, yang akhirnya malah menyebabkan penguasa terperosok tajam sekali. Sebaliknya, kalau dari awal ada kelompok yang bertugas mengkoreksi, ada orang yang mau meluruskan, ada yang mau mengingatkan, saya kira kekuasaan tidak bakal terperosok sedalam seperti sekarang.

Jadi yang berkuasa siapapun dia termasuk pemerintahan Gus Dur-Mega, ya harus mau belajar dari pengalaman masa lalu. Maka harus ada kemauan untuk dikritik dan dikoreksi. PKB-pun juga mesti membuka diri sehingga ada kesediaan untuk dikritik oleh orang-orang yang ada dalam NU.

### Diversifikasi Peran

Maka perlu diversifikasi peran dalam tubuh NU supaya PKB tidak menjadi gula-gula yang akan menciptakan antrian panjang warga NU untuk masuk ke dalamnya tanpa menghiraukan pentingnya pembagian peran. Inilah yang sedang terjadi sekarang karena tidak adanya diversifikasi profesi secara substansial dalam tubuh NU. Sewaktu seminar di Kartika Candra beberapa waktu lalu, ada pengurus wilayah NU yang menurut saya sangat lucu komentarnya. Ia mengatakan; "Lho, kalau memang SDM kita sudah berkualitas semua, lalu hendak diapakan lagi?" Ini lucu. Seandainya dia merasa *qualified*, saya pikir orang-orang justru akan membutuhkan dan mencari dia. Jika orang-orang tidak mencarinya, dia tetap bisa

membikin aktivitas yang mampu mendaftarkan tenaga kerja lain. Kan mestinya begitu.

Contoh ini menunjukkan betapa diversifikasi profesi dalam NU belum berjalan sama sekali. Ini yang harus menjadi garapan NU ke depan. Jangan kayak sekarang. Setiap hari ada puluhan surat, fax, dan telpon dari cabang-cabang yang isinya protes karena tidak setuju dengan calon A, calon B, calon C, dan seterusnya. Padahal sesungguhnya ya mereka berebut dan mengincar kursi DPR atau apalah. Tapi jika nantinya diversifikasi sudah berjalan, katakanlah lembaga pendidikan NU jalan, maka SDM kita juga akan banyak yang tersedot ke sana. Sekarang kan belum jalan. Begitu pula bidang kesehatan. Seandainya klinik-klinik dan rumah sakit kita makin banyak, saya yakin bakal banyak juga tenaga orang-orang NU yang terpakai di sana. Meskipun bukan sebagai tenaga medis, paling tidak urusan administrasinya masih dapat dimasuki. Tapi karena semua belum terkelola dengan baik, maka sewaktu ada partai, semua langsung ikut antri ke sana. Ini memang sangat wajar. Jika NU nanti sudah *organized*, saya pikir kondisinya pasti lebih baik, dan NU bisa lebih profesional sebagai organisasi sosial keagamaan.

Dalam sektor ekonomi sekarang ini sesungguhnya relatif banyak warga NU yang cukup kaya. Bahkan setelah menjadi pengurus PKB, saya melihat perkembangan yang menyenangkan. Di beberapa tempat saya menemui orang-orang yang sudah menyiapkan dana sekian miliar untuk bikin universitas. Hanya saja mungkin belum terkomunikasikan dengan para pemimpin NU. Hal ini tentu saja disebab-

kan oleh NU yang belum *organized*. Jadinya, potensi yang dimiliki tercecer-cecer. Kalau tidak ditata, golongan kayapun masih ingin ikut antri untuk menjadi anggota DPR. Saya pernah tanya latar belakang keinginan mereka, ternyata katanya untuk prestise. Ada lagi yang bilang ingin supaya punya kawan banyak. Ini kan lebih lucu lagi.

### Non Partisan

Dalam menentukan sikap politik NU ke depan saya kira NU harus non partisan supaya lebih profesional. Sedangkan masalah dukungan, saya kira tidak harus dilakukan secara organisatoris. Ada hotline-hotline yang dapat dikerjakan sehingga NU dan PKB bisa tetap punya hubungan. Katakanlah orang-orang di PKB masuk ke dalam struktur kekuasaan. Sangat mungkin misalnya hal-hal yang menyangkut kesejahteraan rakyat, yang secara finansial atau aspiratif, dikaitkan dengan basis massa NU. Umpama PKB akan menangani atau membantu panti-panti asuhan, nanti kontaknya dengan lembag-lembaga yang mengelola panti asuhan, tidak berhubungan dengan secara organisatoris, sehingga NU sendiri bisa bergerak lebih lincah ke sana ke mari. Soalnya jika NU partisan, saya khawatir NGO-NGO luar negeri tidak bersedia bekerja sama dalam masalah pendanaan. Biarkan saja PKB ini menjadi saluran aspirasi dengan pola hubungan yang akan dicarikan bentuk idealnya. Tapi bahwa secara kelembagaan, NU tidak memback up PKB, karena dapat merugikan NU sendiri.